

**ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP PELAPORAN
LINGKUNGAN (*ENVIRONMENTAL
REPORTING*)**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Industri
Kimia Dasar yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2013)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika Dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**FARIDHA ARIPIANTI
NIM. 12030111120015**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Faridha Aripianti
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111120015
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PELAPORAN LINGKUNGAN (*ENVIRONMENTAL REPORTING*)**

Dosen Pembimbing : Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D.

Semarang, 22 Februari 2015

Dosen Pembimbing,

Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D.
NIP. 19640709 199201 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Faridha Aripianti
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111120015
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PELAPORAN LINGKUNGAN (*ENVIRONMENTAL REPORTING*)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 12 Maret 2015

Tim Penguji

1. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D. (.....)
2. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, Macc, Akt. (.....)
3. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Faridha Aripanti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “**Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pelaporan Lingkungan (*Environmental Reporting*)**”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 Februari 2015
Yang membuat pernyataan,

Faridha Aripanti
NIM. 12030111120015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah, Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.”

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

Without knowledge action is useless and knowledge without action is futile

(Abu Bakr as-Siddiq)

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta,

untuk saudara-saudaraku tersayang,

untuk seluruh keluarga besarku,

untuk sahabat-sahabatku,

untuk guru dan teman-teman.

ABSTRACT

The objective of this study is to examine the influence of corporate governance on environmental reporting. Corporate governance structure measured by 4 proxy there are proportion of independent board, institutional ownership, board size, and proportion of female directors. To measure the amount of environmental reporting using the GRI disclosure items. Control variables in this study are firm size as measured by 3 proxy there are total assets, market capitalizations, and operating revenues. Other control variable profitability is measured using ROA (Return on Assets).

The population in this study consists of all the entire mining company and basic industry and chemicals listed in BEI in year 2009-2013. The sampling method used in this study is purposive sampling. The criteria of the sample is a company that has an annual report and sustainability report. By doing sampling and processing data, the final amounts of the sample are 47 samples. This study uses linear regression as an analysis technique to examine the hypotheses.

The data analysis showed that proportion of independent board have significant positive influence on environmental reporting. Institutional ownership concentration and board size did non significantly affect environmental reporting. While the proportion of female directors have significant negative on environmental reporting.

Keyword: *corporate governance, environmental reporting, sustainability report, GRI index.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji mengenai pengaruh dari tata kelola perusahaan atau *corporate governance* terhadap pelaporan lingkungan atau *environmental reporting*. Pengukuran struktur *corporate governance* terdiri dari 4 (empat) proksi yaitu, proporsi komisaris non-eksekutif independen, konsentrasi kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris perempuan. Pengukuran untuk pelaporan lingkungan menggunakan jumlah item pengungkapan dalam GRI. Variabel kontrol dalam penelitian ini terdiri dari ukuran perusahaan yang diukur menggunakan 3 (tiga) proksi yaitu total aset, kapitalisasi pasar, dan *operating revenue*. Variabel kontrol lainnya yaitu profitabilitas yang diukur menggunakan ROA (*Return on Asset*).

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan pertambangan dan industri kimia dasar yang terdaftar dalam BEI tahun 2009-2013. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria dari sampel adalah perusahaan yang memiliki laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Setelah melalui tahap *sampling* dan pengolahan data, didapat sampel akhir yang layak sebanyak 47 sampel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier dalam pengujian hipotesisnya.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa proporsi komisaris non-eksekutif independen secara signifikan berpengaruh positif terhadap pelaporan lingkungan. Konsentrasi kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pelaporan lingkungan. Sementara itu, proporsi komisaris perempuan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pelaporan lingkungan.

Kata kunci: *corporate governance*, pelaporan lingkungan, laporan keberlanjutan, indeks GRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Pelaporan Lingkungan (*Environmental Reporting*)” dapat berjalan dengan lancar dan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program studi sarjana (S1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro. Tidak dapat dipungkiri dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kendala, namun dengan adanya bantuan-bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga kendala tersebut dapat terlewati. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro beserta jajaran Pembantu Dekan serta staf-stafnya.
2. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Ibu Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan di Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan-masukan ilmunya serta waktu yang telah diluangkan untuk proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

5. Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas segala ilmu yang telah diberikan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku tercinta, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan perhatian serta dukungannya yang selalu diberikan untuk penulis.
7. Saudara-saudaraku tersayang, Kak Rani, Vita, Novi dan Dinda.
8. Nenekku tercinta yang telah memberikan doa dan didikannya, serta seluruh keluarga besar atas dukungannya.
9. Sahabat-sahabat semasa kuliah, khususnya kepada Genk UNO: Afina, Mima, Alisyia, Wenny, Nonie, Isti, Tika, dan Ana. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.
10. Semua teman-teman Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro angkatan 2011.
11. Teman-teman organisasi KSEI, KSPM, dan Peduli Dhuafa.
12. Teman-teman KKN Tim 2 Desa Soneyan: Sabi, Sari, Ria, Kiki, Mba Susan, Ellen, Rista, Mas Mamet, Faizal, dan Mas Gayuh. Terima kasih atas kebersamaannya di Pati.
13. Kos Wisma Aulia *Family* : Siti, Risfa, Dhani, Nurin, Kia, Cici, Rifa, Nurul, Ain, Mba Ziza, Ana, Putri, Linda, Intan, Rj, dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama hampir 4 tahun ini.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Tidak dapat dipungkiri, skripsi yang penulis susun ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semarang, 22 Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Landasan Teori.....	12
2.1.1. Teori Agensi.....	12
2.1.2. Teori Legitimasi	14
2.1.3 Pelaporan Lingkungan (<i>Environmental Reporting</i>).....	15
2.1.4 Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>).....	17
2.1.5 Komisaris Independen (<i>Independent Directors</i>).....	18
2.1.6 Konsentrasi Kepemilikan (<i>Ownership Concentration</i>)	19
2.1.7 Ukuran Dewan Komisaris (<i>Board Size</i>).....	20
2.1.8 Proporsi Komisaris Perempuan.....	21
2.2. Penelitian Terdahulu	22
2.3. Kerangka Pemikiran.....	25
2.4. Hipotesis.....	27
2.4.1. Hubungan komisaris non-eksekutif independen dan pelaporan lingkungan.....	27
2.4.2. Hubungan kepemilikan institusional dan pelaporan lingkungan.....	28
2.4.3 Hubungan ukuran dewan komisaris dan pelaporan lingkungan.....	29
2.4.4 Hubungan proporsi komisaris perempuan dan pelaporan lingkungan.....	30
BAB III. METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian	32

3.1.1. Variabel Dependen.....	33
3.1.2. Variabel Independen	34
3.1.2.1 Komisaris Independen.....	34
3.1.2.2 Konsentrasi Kepemilikan	35
3.1.2.3 Ukuran Dewan Komisaris	35
3.1.2.4 Proporsi Komisaris Perempuan.....	35
3.1.3 Variabel Kontrol.....	36
3.1.3.1 Ukuran Perusahaan.....	36
3.1.3.2 Profitabilitas	37
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	37
3.3 Jenis dan Sumber Data	38
3.4 Metode Pengumpulan Data	39
3.5 Metode Analisis	39
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	39
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	39
3.5.2.1 Uji Normalitas	40
3.5.2.2 Uji Multikolonieritas.....	41
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	41
3.5.3 Uji Autokolerasi	42
3.5.4 Uji Penerimaan dan Penolakan Hipotesis	43
3.5.4.1 Uji Pengaruh Simultan (Uji F)	43
3.5.4.2 Koefisien Determinasi R Kuadrat (R^2)	44
3.5.4.3 Uji Parsial (<i>t-test</i>)	44
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	46
4.2 Analisis Data	47
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	47
4.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda	50
4.2.3 Uji Asumsi Klasik	51
4.2.3.1 Uji Normalitas	51
4.2.3.2 Uji Multikolonieritas.....	53
4.2.3.3 Uji Heteroskedastisitas	54
4.2.3.4 Uji Autokolerasi	56
4.2.4 Hasil Uji Penerimaan dan Penolakan Hipotesis.....	57
4.2.4.1 Uji Kelayakan Model	57
4.2.4.2 Model dan Uji t	59
4.3 Intepretasi Hasil	62
BAB V. PENUTUP.....	66
5.1 Simpulan	66
5.2 Keterbatasan.....	68
5.3 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	32
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif	47
Tabel 4.2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	53
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolonieritas	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Glejser.....	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Durbin Watson.....	57
Tabel 4.6 Hasil Uji F dan Uji Determinasi	58
Tabel 4.7 Hasil Uji t ENV_DISC.....	59
Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Uji Regresi	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	26
Gambar 4.1 Histogram Normalitas Regresi ENV_DISC.....	51
Gambar 4.2 Normal Probability Plot Regresi ENV_DISC.....	52
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Indikator GRI.....	74
Lampiran B Daftar Perusahaan Sampel	76
Lampiran C Uji Statistik Deskriptif	78
Lampiran D One-Sample Kolmogorov-Sminorv	79
Lampiran E Uji Regresi Berganda	80
Lampiran F Uji Glejser	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaporan informasi mengenai kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan akhir-akhir ini menarik untuk diteliti. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Gibson dan O'Donovan (2007), bahwa ada kecenderungan yang meningkat untuk organisasi di seluruh dunia untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan sosial dan lingkungannya. Keinginan perusahaan untuk melegitimasi perusahaan mereka merupakan salah satu motivasi utama perusahaan untuk melaporkan kegiatan lingkungan yang dilakukannya (Cho dan Patten, 2007). Hal ini dikarenakan pengungkapan pelaporan lingkungan merupakan salah satu alat untuk mendapatkan legitimasi.

Bagi sebuah perusahaan, mempertahankan kelangsungan hidup bisnisnya merupakan suatu hal yang sangat penting. Salah satu caranya adalah dengan membuat investor percaya dan ingin untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, selain bertujuan untuk mendapatkan laba atau profit dari kegiatan operasionalnya, perusahaan juga harus memberikan kontribusi secara positif salah satunya terhadap lingkungan atas kegiatan usaha yang dilakukannya. Tanggung jawab mengenai kinerja lingkungan perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan ini akan menjadi salah satu pertimbangan bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya untuk ingin berinvestasi dan melakukan kerjasama bisnis dengan perusahaan tersebut.

Banyak peneliti yang telah mencatat bahwa betapa pentingnya suatu organisasi atau perusahaan untuk mempertimbangkan pengaruh perusahaannya terhadap lingkungan dan penting pula bagi perusahaan untuk mengungkapkan hasil kinerja lingkungannya kepada kelompok yang lebih luas dalam hal ini meliputi para pemangku kepentingan (Deegan, 1994), termasuk karyawan, konsumen, masyarakat, regulator, media massa, dan pemegang saham (Adams dan Zutshi, 2004). Selanjutnya, Adams dan Zutshi (2004) percaya bahwa pelaporan lingkungan dapat meningkatkan pengembalian keuangan (*financial return*) dan dapat meningkatkan nilai perusahaan meskipun mungkin tidak terukur.

Pelaporan lingkungan (*environmental reporting*) merupakan salah satu cara penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kinerja perusahaan. Pelaporan lingkungan adalah suatu aktivitas yang ditunjukkan perusahaan untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan. Pelaporan lingkungan secara luas didefinisikan sebagai pemberian informasi sehubungan dengan implikasi lingkungan dari kegiatan operasi perusahaan (Deegan, 2006). Pelaporan kinerja lingkungan tidak hanya membantu perusahaan untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder, tetapi juga akan membantu perusahaan untuk menilai risiko yang mungkin akan terjadi dalam proses operasional perusahaan, dan untuk mengurangi dampak dari operasional perusahaan terhadap lingkungan.

Di Indonesia pelaporan lingkungan wajib untuk dilaporkan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 yang dijelaskan dalam Bab V Pasal 74, dikatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Tata kelola perusahaan dirancang untuk memasukkan mekanisme yang efektif untuk mengendalikan dan mencegah perilaku manajerial mementingkan dirinya sendiri. Meskipun tata kelola perusahaan muncul sebagai solusi potensial untuk masalah keagenan, pandangan yang lebih luas dari tata kelola perusahaan adalah berkonsentrasi untuk melindungi kepentingan stakeholders (Canadian Institute of Chartered Accountants, 1995). Oleh karena itu, diharapkan adanya suatu sistem tata kelola perusahaan yang efektif yang akan memiliki efek positif pada kinerja keseluruhan perusahaan, baik keuangan maupun non-keuangan.

Permasalahan yang terkait dengan lingkungan di Indonesia sudah banyak terjadi, mulai dari pencemaran limbah, kebakaran hutan serta bencana alam lainnya yang salah satu penyebabnya adalah dari hasil kegiatan operasional perusahaan yang ada di Indonesia. Kegiatan pertambangan adalah salah satu kegiatan yang paling banyak memberikan dampak atau berdampak terhadap lingkungan. Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), diperkirakan sekitar 70 persen kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan. Semakin besar skala kegiatan pertambangan, makin besar pula area dampak yang ditimbulkan oleh operasi pertambangan tersebut.

PT Freeport Indonesia adalah potret nyata buruknya sektor pertambangan di Indonesia. Dampak lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan ini

diantaranya menyebabkan matinya Sungai Aijkwa, Aghawagon, dan Otomona. Selain itu, terdapatnya tumpukan batuan limbah tambang dan *tailing* yang ditotal mencapai 840.000 ton serta matinya ekosistem di sekitar lokasi pertambangan PT Freeport Indonesia (WALHI, 2011). Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Freeport telah banyak mendapatkan keuntungan secara finansial yang sebagian besarnya hanya dinikmati oleh perusahaan asing tersebut, namun tidak memberikan manfaat bagi negara Indonesia khususnya bagi masyarakat Papua tempat dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Kerusakan lingkungan lainnya juga terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah yang disebabkan oleh aktivitas tambang batubara PT Ferto Rejang. Penambangan batubara di daerah hulu di Bengkulu Tengah dinilai telah mencemari Sungai Bangkahulu yang menjadi sumber air baku PDAM untuk warga Kota Bengkulu (Kompas, 2012). Contoh lainnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan terjadi di Kabupaten Konawe Selatan yakni terjadi dikarenakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Integra Mining yang mengeruk nikel hingga menghabisi hutan bakau atau *mangrove* (Wibisono, 2011). Selain itu, terjadi pula pencemaran lingkungan di Teluk Buyat di Sulawesi Utara yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Penyebab tercemarnya Teluk Buyat adalah pencemaran air laut akibat logam berat arsen (As) dan merkuri (Hg) yang melebihi ambang batas. Pencemaran ini disebabkan oleh PT Newmont Minahasa Raya yang membuang *tailing* atau batuan dan tanah sisa ekstraksi bijih emas ke dasar laut di Teluk Buyat.

Selain pertambangan, kegiatan perusahaan lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan adalah industri kimia dasar. Menurut Surat Keputusan Menperin No. 19 M/SK/1986, industri kimia dasar adalah industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Contoh industri ini yaitu industri kertas, semen, pupuk, selulosa, dan karet. Salah satu contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri ini yaitu kasus tercemarnya Kali Brantas. Pencemaran Kali Brantas ini disebabkan oleh aktivitas pembuangan limbah cair oleh pabrik kertas PT Tjiwi Kimia. Kali Brantas oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11 A/PRT/M/2006 merupakan sungai strategis Nasional.

Permasalahan lingkungan yang banyak terjadi ini secara otomatis akan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi. Oleh karenanya, penting dan perlu bagi perusahaan untuk mempertanggung jawabkan kegiatan operasional perusahaannya dalam laporan keuangan. Adams dan Zutshi (2004) merekomendasikan bahwa struktur pemerintahan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa dampak sosial, lingkungan dan keprihatinan kelompok pemangku kepentingan merupakan hal utama yang dibahas dalam pengambilan keputusan perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan tingkat pelaporan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, dalam konteks bagaimana organisasi atau perusahaan tersebut diatur. Pemerintahan yang efektif harus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan menyajikan lebih banyak pengungkapan atau pelaporan, baik secara sukarela maupun wajib. Gibson dan

O'Donovan (2007) menyatakan bahwa peningkatan pelaporan lingkungan dapat dicapai dengan tata kelola perusahaan yang kuat, yang meliputi penyediaan informasi lingkungan kepada pemangku kepentingan yang sah.

Studi empiris yang dilakukan oleh Halme dan Huse (1997) meneliti hubungan antara *Environmental Reporting* dan *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam penelitian tersebut, diambil sampel 140 perusahaan yang ada di negara Finlandia, Norwegia, Spanyol, dan Swedia. Penelitian Halme dan Huse (1997) tidak menunjukkan adanya hubungan antara pelaporan lingkungan dengan praktik *Good Corporate Governance*. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ienci – Alin *et al.* (2012), meneliti hubungan antara *Environmental Reporting* dan *Corporate Governance* (CG). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 54 perusahaan terbesar yang beroperasi di sektor perminyakan dan penyulingan minyak (*Petroleum and Petroleum Redifining*). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat hubungan antara *safety and social responsibility commitee* dengan *environmental reporting*, sedangkan untuk variabel direktur non-eksekutif independen dan ukuran direksi tidak terdapat hubungan dengan *environmental reporting*.

Penelitian yang dilakukan oleh Kathyayini Kathy Rao *et al.* (2012) meneliti mengenai hubungan *Corporate Governance* dan *Environmental Reporting*. Variabel yang digunakan sebagai karakteristik dari *corporate governance* adalah direktur non-eksekutif independen (*independent non-executive directors*), konsentrasi kepemilikan (*ownership concentration*), ukuran direksi (*board size*), dan proporsi direktur perempuan (*proportion of female directors*). Berdasarkan

hasil penelitian dari Kathyayini Kathy Rao *et al.* (2012), semua tindakan atau karakteristik dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*) secara signifikan memiliki hubungan yang positif dengan pelaporan lingkungan (*environmental reporting*).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kathyayini Kathy Rao *et al.* (2011), sampel penelitian yang digunakan akan berbeda dengan sampel pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan memeriksa data untuk pelaporan lingkungan dalam laporan keuangan tahunan dari perusahaan tambang dan industri kimia dasar di Indonesia yang terdaftar atau *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara struktur tata kelola perusahaan dan pelaporan lingkungan. Sampel tersebut diambil karena perusahaan pertambangan dan industri kimia dasar merupakan perusahaan yang aktivitas operasionalnya banyak menyebabkan kerusakan pada lingkungan.

Selain itu, Indonesia menerapkan sistem dua tingkat (*two tier board system*) dimana terdapat pemisahan antara fungsi direksi dan fungsi pengawasan maka variabel ukuran dewan direksi (*board size*) diubah menjadi variabel ukuran dewan komisaris. Sehingga dalam rangka untuk menguji apakah *corporate governance* yang efektif akan meningkatkan tingkat pengungkapan kinerja lingkungan, maka penelitian ini akan mengembangkan empat atribut dari tata kelola perusahaan yaitu, komisaris non-eksekutif independen, kepemilikan konstitusional, ukuran dewan komisaris dan proporsi komisaris perempuan dalam perusahaan.

Penelitian ini akan memberikan gambaran dari literatur sebelumnya yang mengeksplorasi pentingnya pelaporan lingkungan, tata kelola perusahaan, dan hubungan antara pengungkapan atau pelaporan lingkungan dan tata kelola perusahaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas struktur tata kelola perusahaan pada pengungkapan yang dilakukan secara sukarela, khususnya berfokus pada pelaporan lingkungannya. Penelitian ini akan menyoroti apakah struktur tata kelola perusahaan berkaitan dengan peningkatan pengungkapan kinerja lingkungan dalam laporan keuangan tahunan. Penelitian ini diberi judul ” **ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PELAPORAN LINGKUNGAN (*ENVIRONMENTAL REPORTING*) (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Industri Kimia Dasar yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka dapat didefinisikan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah komisaris non-eksekutif independen berpengaruh terhadap pelaporan lingkungan perusahaan?
2. Apakah kepemilikan konstitusional atau konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap pelaporan lingkungan perusahaan?
3. Apakah ukuran komisaris pada perusahaan berpengaruh terhadap pelaporan lingkungan perusahaan?

4. Apakah proporsi komisaris perempuan pada perusahaan berpengaruh pada pelaporan lingkungan perusahaan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh komisaris non-eksekutif independen terhadap pelaporan lingkungan perusahaan.
2. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan konstitusional atau konsentrasi kepemilikan terhadap pelaporan lingkungan perusahaan.
3. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ukuran komisaris pada perusahaan terhadap pelaporan lingkungan perusahaan.
4. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh proporsi komisaris perempuan pada perusahaan terhadap pelaporan lingkungan perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan lingkungan pada perusahaan pertambangan yang *listing* atau terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan memberikan pemahaman, khususnya mengenai pelaporan lingkungan pada perusahaan *go public* serta dapat dijadikan referensi pengetahuan dan bahan diskusi bagi pembaca mengenai masalah yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan pelaporan lingkungan perusahaan.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan investor mengenai penyajian laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparan oleh perusahaan terutama yang menyangkut tentang pelaporan lingkungan yang disajikan oleh perusahaan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) oleh perusahaan yang bersangkutan sehingga para investor dapat mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi.

4. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan untuk menyajikan laporan mengenai kinerja lingkungan perusahaannya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. TELAAH PUSTAKA

Bab ini akan membahas tentang landasan teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang variabel penelitian, definisi operasional, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode dalam pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV. HASIL DAN PENELITIAN

Bab ini akan dibahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hipotesis.

BAB V. PENUTUP

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Menurut Hendirksen (2001), *agency theory* adalah teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dalam hal ini para *stakeholders* dan manajemen perusahaan sebagai agen. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan adalah suatu kontrak di mana satu orang atau lebih atau yang disebut dengan prinsipal, menyewa serta memberikan wewenang kepada satu orang yang lain atau lebih yang disebut dengan agen untuk menjalankan tugas dan mengambil keputusan bagi kepentingan prinsipal. Hubungan keagenan dapat menimbulkan konflik kepentingan diantara kedua belah pihak, yaitu prinsipal dan agen. Konflik dapat terjadi karena pemberi wewenang atau prinsipal merasa agen tidak bertindak sesuai dengan keinginan, atau agen bertindak untuk kepentingannya pribadi atau disebut juga dengan *moral hazzard*.

Konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen tersebut dapat menimbulkan adanya biaya keagenan atau *agency cost*. Biaya keagenan merupakan penurunan kesejahteraan atau keuntungan yang dialami oleh prinsipal dikarenakan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen.

Jensen dan Meckling membagi *agency cost* menjadi 3, yaitu:

1. Monitoring Cost

Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengamati, mengukur, dan mengontrol perilaku agen.

2. Bonding Cost

Bonding cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal.

3. Residual Loss

Residual loss adalah bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh prinsipal berupa berkurangnya kemakmuran atau keuntungan prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan yang diambil oleh agen dan prinsipal.

Oleh karena itu, pentingnya membentuk suatu struktur tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar hubungannya dengan pemangku kepentingan dapat terjalin dengan baik sehingga dapat meminimalkan terjadinya konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perusahaan. Peran GCG dalam hal ini sangat penting karena memiliki peran untuk mengendalikan perusahaan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan dari para pemangku kepentingan. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan transparan kepada pemangku kepentingan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab agen sebagai manajemen perusahaan.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyebutkan bahwa perusahaan tidak akan bertahan jika tidak mendapat dukungan dari lingkungan sosial, meskipun kinerja keuangannya sudah baik. Hal ini berarti kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada penilaian masyarakat atau publik terhadap perusahaan tersebut. Suatu legitimasi terjadi ketika nilai-nilai yang ada dalam perusahaan sama dengan atau selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Ketika terjadi perbedaan antara nilai-nilai yang ada dalam perusahaan dan yang ada dalam masyarakat, maka hal ini lah yang disebut dengan “*legitimacy gap*”.

Menurut Warticl dan Mahon (dalam Chariri dan Ghozali, 2007), *legitimacy gap* dapat terjadi karena tiga alasan:

1. Adanya perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah.
2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah.
3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda.

Teori legitimasi dilandasi oleh kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali dan Chariri, 2007). Dowling dan Pfeffer (dalam Chariri dan Ghozali, 2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi ini bermanfaat dalam menganalisis perilaku dalam organisasi. Mereka mengatakan (p.131):

Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

2.1.3 Pelaporan Lingkungan (*Environmental Reporting*)

Pelaporan lingkungan adalah suatu aktivitas yang ditunjukkan perusahaan untuk menunjukkan kegiatan-kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan. Pelaporan lingkungan secara luas didefinisikan sebagai pemberian informasi sehubungan dengan implikasi lingkungan dari kegiatan operasi perusahaan (Deegan, 2006). Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia menggunakan standar yang dikembangkan oleh GRI (Global Reporting Initiatives). GRI menyediakan untuk semua perusahaan dengan kerangka pelaporan keberlanjutan yang komprehensif yang digunakan di seluruh dunia (www.globalreporting.org).

Daftar pengungkapan sosial yang berdasarkan standar GRI menggunakan 6 indikator pengungkapan, yaitu:

1. Ekonomi

Tema ini berisi 9 (sembilan) item yang mencakup laba perusahaan yang dibagikan untuk bonus pemegang saham, kompensasi karyawan, pemerintah, membiayai kegiatan akibat perubahan iklim serta aktivitas terkait ekonomi lainnya.

2. Lingkungan hidup

Tema ini berisi 30 (tiga puluh) item yang meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi

bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.

3. Ketenagakerjaan

Tema ini berisi 14 (empat belas) item yang meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi perekrutan, program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya.

4. Hak asasi manusia

Tema ini berisi 9 (sembilan) item yang mencakup berapa besar jumlah investasi yang melibatkan perjanjian terkait hak asasi manusia, pemasok dan kontraktor yang menjunjung hak asasi, kejadian yang melibatkan kecelakaan atau kriminal terhadap karyawan di bawah umur, dan aktivitas lainnya.

5. Kemasyarakatan

Tema ini berisi 8 (delapan) item yang mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.

6. Tanggung jawab atas produk

Tema ini berisi 9 (sembilan) item yang melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan *durability*, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.

2.1.4 Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan mendorong perusahaan untuk mempromosikan etika, keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam semua urusan mereka (Jamali et al., 2008) dan meningkatkan lingkungan berbasis pengungkapan di mana manajer dipaksa untuk bertindak demi kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan (Hamilton, 2004). Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006) mendefinisikan *corporate governance* sebagai pedoman yang menjelaskan langkah-langkah yang perlu ditempuh perusahaan untuk menciptakan situasi *check and balance*, menegakkan transparansi dan akuntabilitas, serta merealisasikan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Adapun asas-asas GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) di dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006, yaitu (KNKG, 2006) :

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.5 Komisaris Independen (*Independent Directors*)

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan praktik Good Corporate Governance (GCG) (KNKG, 2006). Berdasarkan pedoman umum good corporate governance yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Hadirnya lebih banyak komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris dapat lebih memberikan banyak kekuatan untuk memantau kinerja manajemen untuk mengungkapkan informasi mengenai lingkungan lebih lanjut. Komisaris independen dapat lebih memantau kinerja manajemen karena posisi non-resmi mereka dalam perusahaan (Donnelly dan Mulcahy, 2008) dan memiliki insentif untuk membangun reputasi sebagai pemantau ahli yang dapat mencegah perilaku manajemen untuk melakukan tindakan kolusi dengan direksi dalam perusahaan (Carter et al., 2003).

2.1.6 Konsentrasi Kepemilikan (*Ownership Concentration*)

Konsentrasi kepemilikan dianggap sebagai aspek penting dari tata kelola perusahaan apakah itu tersebar atau terkonsentrasi (Shan, 2009). Kepemilikan institusional merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang terkonsentrasi dan diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham besar dan / atau kelembagaan. Kepemilikan yang terkonsentrasi akan lebih mampu mempengaruhi nilai-nilai perusahaan, termasuk nilai-nilai lingkungan (Halme dan Huse, 1997). Selanjutnya, Brammer dan Pavelin (2008) menemukan bahwa dengan konsentrasi kepemilikan yang lebih besar, perusahaan cenderung untuk mengungkapkan kebijakan lingkungan mereka.

2.1.7 Ukuran Dewan Komisaris (*Board Size*)

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance (KNKG, 2006). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Tugas dewan komisaris dijelaskan secara lebih terperinci pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 ayat 1 dan 2 yaitu dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Menurut FCGI (2002), berkenaan dengan bentuk Dewan di dalam sebuah perusahaan, terdapat dua sistem yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda pula, yaitu:

1. Sistem Hukum Anglo Saxon mempunyai Sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*. Sistem ini hanya mempunyai satu Dewan Direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja dengan prinsip kerja paruh waktu (Non Direktur Eksekutif). Pada dasarnya yang disebut belakangan ini diangkat karena kebijakannya, pengalamannya dan relasinya. Negara-negara yang menerapkan *One Tier System* ini misalnya Amerika Serikat dan Inggris.

2. Sistem Hukum Kontinental Eropa mempunyai Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*. Sistem ini mempunyai dua badan terpisah di dalam sebuah perusahaan, yaitu Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). Dewan Direksi bertugas untuk mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris. Dalam sistem ini, anggota Dewan Direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh Dewan Komisaris. Dewan Direksi juga harus memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Sehingga Dewan Komisaris terutama bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diganti berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Negara-negara yang menerapkan *Two Tiers System* adalah Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang. Karena sistem hukum Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda, maka hukum perusahaan di Indonesia menerapkan *Two Tiers System*.

2.1.8 Proporsi Komisaris Perempuan

Tingkat keragaman di jajaran dewan komisaris akan mempengaruhi keputusan yang diambil dan kegiatan yang akan dilakukan (Adams dan Ferreira, 2004). Salah satu karakteristik yang diperdebatkan adalah keanekaragaman gender pada jajaran dewan komisaris. Hadirnya perempuan dalam dewan komisaris akan memberikan gambaran-gambaran yang mendetail atau rinci mengenai pelaporan-pelaporan yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan. Perempuan juga memiliki rasa perhatian yang khusus terutama dalam masalah mengenai lingkungan.

Huse dan Solberg (2006) menemukan bahwa perempuan lebih berkomitmen, lebih siap, lebih rajin, dalam mengajukan berbagai pertanyaan sehingga mampu menciptakan suasana yang baik dalam rapat komisaris. Demikian pula, Adams dan Ferreira (2004) menemukan bahwa lebih banyak perempuan dalam jajaran dewan komisaris akan meningkatkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas dewan dan partisipasi kehadiran perempuan cenderung lebih baik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Halme dan Huse (1997) meneliti hubungan antara *Environmental Reporting* dan *Good Corporate Governance* (GCG). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *environmental reporting* atau pelaporan lingkungan, sedangkan variabel independennya adalah konsentrasi kepemilikan dan ukuran direksi. Sampel dari penelitian ini adalah 140 perusahaan yang ada di negara Finlandia, Norwegia, Spanyol, dan Swedia. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapatnya hubungan antara variabel-variabel independen yaitu konsentrasi kepemilikan dan ukuran direksi dengan pelaporan lingkungan.

De Villers *et al.* (2009) melakukan penelitian mengenai hubungan antara *Corporate Environmental Performance* (CEP) dan mekanisme *Corporate Governance* (CG). Sampel dari penelitian ini adalah 100 perusahaan terbesar yang ada di USA. *Corporate governance* diprosikan oleh ukuran direksi, investor institusional, proporsi direktur independen, dan *CEO duality*. Hasil dari penelitian

ini adalah terdapat hubungan positif antara CEP dengan variabel independen ukuran direksi dan proporsi direktur independen. Sedangkan terdapat hubungan negatif antara CEP dengan variabel independen investor institusional dan *CEO duality*.

Kathyayani Kathy Rao *et al.* (2011) melakukan penelitian tentang hubungan *Corporate Governance* dan *Environmental Reporting*. Karakteristik dari *corporate governance* yang digunakan adalah direktur non-eksekutif independen (*independent non-executive directors*), konsentrasi kepemilikan (*ownership concentration*), ukuran direksi (*board size*), dan proporsi direktur perempuan (*proportion of female directors*). Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah *firm size*, *profitability*, dan *industry*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 perusahaan terbesar yang *listing* di Australian Stock Exchange (ASX). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa semua tindakan atau karakteristik dari tata kelola perusahaan memiliki hubungan yang positif signifikan dengan pelaporan lingkungan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ienciu Ionel – Alin *et al.* (2012), meneliti hubungan antara *Environmental Reporting* dan *Corporate Governance* (CG). Variabel independen sebagai proksi dari CG yaitu persentase direktur non-eksekutif independen, ukuran direksi, dan *safety and social responsibility committee*. Dalam penelitian ini juga terdapat variabel kontrol yaitu *revenue* atau pendapatan. Sampel dalam penelitian ini adalah 54 perusahaan terbesar yang beroperasi di sektor perminyakan dan penyulingan minyak (*Petroleum and Petroleum Redifining*). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat

hubungan antara *safety and social responsibility commitee* dengan *environmental reporting*, sedangkan untuk variabel direktur non-eksekutif independen dan ukuran direksi tidak terdapat hubungan dengan *environmental reporting*.

Ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu ini disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Sampel	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian (Hubungan)
1.	Halme dan Huse (1997)	140 perusahaan di Finlandia, Norwegia, Spanyol, dan Swedia	Environmental Reporting	<ul style="list-style-type: none"> - Konsentrasi Kepemilikan - Ukuran Direksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada hubungan - Tidak ada hubungan
2.	De Villiers et al. (2009)	100 perusahaan terbesar di USA	Corporate Environmental Performance	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran direksi - Investor institusional - Proporsi direktur independen - CEO duality 	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan Positif - Hubungan Negatif - Hubungan Positif - Hubungan Negatif
3.	Ienciu Ionel – Alin et al. (2012)	54 perusahaan terbesar yang beroperasi di sektor perminyakan dan penyulingan minyak (Petroleum and Petroleum Refining)	Environmental Reporting	<ul style="list-style-type: none"> - Persentasi direktur non-eksekutif independen - Ukuran direksi - Safety and Social Responsibility Commitee 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat hubungan - Tidak ada hubungan - Terdapat hubungan

4.	Kathyay ini Kathy Rao et al. (2012)	100 perusahaan terbesar di Australiaan Stock Exchange (ASX)	Environmental disclosure	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur non-eksekutif independen - Konsentrasi kepemilikan - Ukuran direksi - Proporsi direktur perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan Positif - Hubungan Positif - Hubungan Positif - Hubungan Positif
----	-------------------------------------	---	--------------------------	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

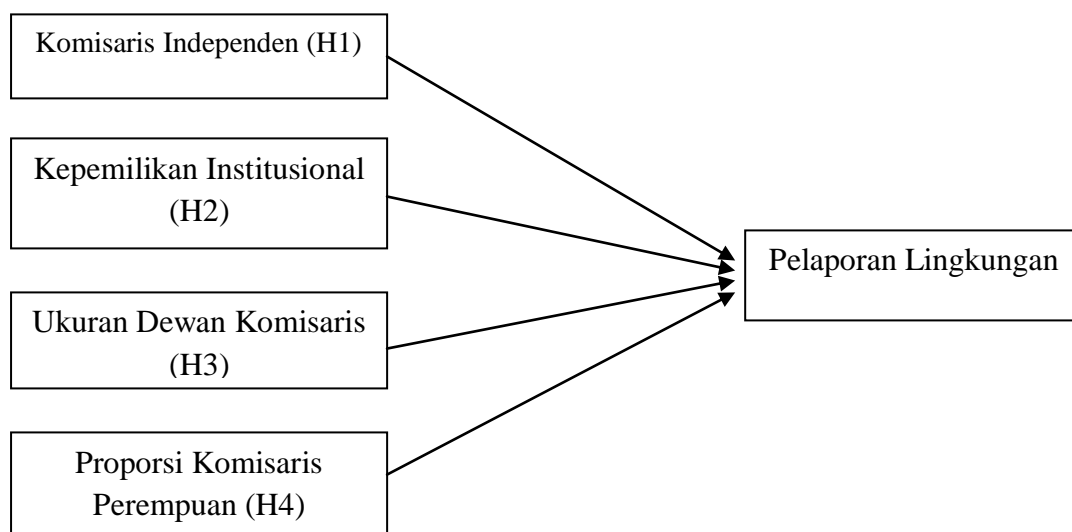
Berdasarkan hipotesis yang diuji dalam penelitian ini, kerangka pemikiran ini akan menggambarkan hubungan antara *Corporate Governance* dengan pelaporan lingkungan atau *Environmental Reporting*. *Corporate Governance* diproksikan oleh Komisaris Independen yaitu anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham penendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen untuk kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Pelaporan lingkungan akan cenderung meningkat sesuai dengan meningkatnya proporsi komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris perusahaan.

Selain itu, CG juga diproksikan oleh Kepemilikan Institusional yaitu merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang terkonsentrasi dan diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham besar dan / atau kelembagaan. Pemegang saham yang kuat sering memiliki pengaruh yang lebih pada keputusan manajemen dan oleh karenanya perusahaan itu sendiri menjadi kurang independen di bawah kepemilikan yang sangat terkonsentrasi. Proksi

lainnya untuk CG adalah Ukuran Dewan Komisaris yaitu jumlah anggota dewan dalam jajaran dewan komisaris. Selanjutnya, CG juga diproksikan dengan Proporsi Komisaris Perempuan yaitu jumlah anggota dewan komisaris perempuan dalam jajaran dewan komisaris. Adams dan Ferreira (2004) menemukan bahwa lebih banyak perempuan dalam jajaran dewan komisaris akan meningkatkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas dewan dan partisipasi kehadiran perempuan cenderung lebih baik.

Untuk mempermudah dalam melihat hubungan antara *Corporate Governance* yang diproksikan dengan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, dan Proporsi Komisaris Perempuan terhadap Pelaporan Lingkungan (*Environmental Reporting*), maka disajikan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Hubungan komisaris non-eksekutif independen dan pelaporan lingkungan

Independensi dari dewan komisaris di perusahaan merupakan masalah tata kelola perusahaan yang paling banyak diperdebatkan dan dihadapi oleh perusahaan. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham penndali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen untuk kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Komisaris independen dapat lebih memantau kinerja manajemen karena posisi non-resmi mereka dalam perusahaan (Donnelly dan Mulcahy, 2008) dan memiliki insentif untuk membangun reputasi sebagai pemantau ahli yang dapat mencegah perilaku manajemen untuk melakukan tindakan kolusi dengan direksi dalam perusahaan (Carter et al., 2003). Mengacu pada teori agensi, keberadaan komisaris independen dapat mencegah tindakan manajemen perusahaan dalam melakukan hal-hal yang merugikan investor dan hanya menguntungkan diri sendiri. Banyak penelitian sebelumnya yang telah menyoroti pentingnya komisaris independen dalam perilaku pengungkapan perusahaan baik wajib maupun sukarela (Cahaya et al, 2009).

Menurut De Villiers *et al.* (2009) perusahaan dengan kinerja lingkungan yang kuat memiliki direksi yang lebih independen. Komisaris independen akan lebih meningkatkan transparansi dewan dalam perusahaan dan secara sukarela akan mengungkapkan informasi tambahan (Chen dan Jaggi, 2000). Dewan

komisaris yang lebih mandiri atau independen lebih mungkin untuk memastikan bahwa perusahaan melakukan tanggung jawab sosial, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pelaporan lingkungan akan cenderung meningkat sesuai dengan meningkatnya proporsi komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Terdapat pengaruh positif komisaris non-eksekutif independen terhadap jumlah dari pelaporan lingkungan.

2.4.2 Hubungan kepemilikan institusional dan pelaporan lingkungan

Konsentrasi kepemilikan dianggap sebagai aspek penting dari tata kelola perusahaan apakah itu tersebar atau terkonsentrasi (Shan, 2009). Kepemilikan institusional merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang terkonsentrasi dan diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham besar dan / atau kelembagaan. Investor besar lebih mungkin untuk mendominasi dan mempengaruhi keputusan manajemen (Lau et al., 2009) karena mereka memegang sejumlah besar saham di perusahaan. Sejalan dengan teori legitimasi, dikatakan bahwa manajemen perusahaan akan melakukan pelaporan tentang CSR lebih banyak agar mendapatkan legitimasi dari para investor dan pemangku kepentingan lainnya. Donnelly dan Mulcahy (2008) menemukan hubungan positif antara proporsi saham yang oleh investor institusional dan tingkat pengungkapan sukarela dalam perusahaan.

Namun, sebagian besar studi telah menemukan hubungan negatif antara kepemilikan institusional dan pengungkapan perusahaan (Habib dan Jiang, 2009).

Kepemilikan yang terkonsentrasi akan lebih mampu mempengaruhi nilai-nilai perusahaan, termasuk nilai-nilai lingkungan (Halme dan Huse, 1997). Selanjutnya, Brammer dan Pavelin (2008) menemukan bahwa dengan konsentrasi kepemilikan yang lebih besar, perusahaan cenderung untuk mengungkapkan kebijakan lingkungan mereka. Pemegang saham yang kuat sering memiliki pengaruh yang lebih pada keputusan manajemen dan oleh karenanya perusahaan itu sendiri menjadi kurang independen di bawah kepemilikan yang sangat terkonsentrasi. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : Terdapat pengaruh negatif kepemilikan institusioanl terhadap pelaporan lingkungan.

2.4.3 Hubungan ukuran dewan komisaris dan pelaporan lingkungan

Ukuran dewan komisaris atau jumlah dewan dalam jajaran dewan komisaris, memainkan peranan penting dalam memantau kinerja dewan. Banyak studi yang meneliti tentang ukuran direksi dan kinerja perusahaan sebelum melakukan studi yang secara langsung berhubungan dengan pengungkapan. Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh baik secara positif maupun negatif berkaitan dengan kinerja perusahaan. Direksi yang berukuran kecil lebih efektif dalam memantau tindakan manajemen (De Villiers *et al*, 2009) dan dapat berfungsi secara efektif karena keputusan dalam perusahaan akan lebih mudah diambil (Cheng, 2008).

Penelitian lain menyatakan bahwa papan yang lebih besar lebih efektif karena mereka dapat membawa lebih banyak pengalaman dan pengetahuan dan

akan menawarkan saran-saran yang lebih baik pula (Bonn, 2004). Teori agensi menjelaskan bahwa dewan komisaris yang besar dapat dengan mudah mengendalikan manajemen perusahaan dalam bertindak yang merugikan pemangku kepentingan. Namun komisaris dengan jumlah yang lebih besar akan memiliki kelemahan-kelemahan diantaranya akan kurangnya komunikasi, pengambilan keputusan yang lambat, dan kurangnya kebulatan atau kesepakatan suara yang diambil oleh jajaran komisaris sehingga akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari dewan komisaris itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H3 : Terdapat pengaruh negatif ukuran dewan komisaris terhadap pelaporan lingkungan.

2.4.4 Hubungan proporsi komisaris perempuan dan pelaporan lingkungan

Tingkat keragaman di jajaran dewan komisaris akan mempengaruhi keputusan yang diambil dan kegiatan yang akan dilakukan (Adams dan Ferreira, 2004). Salah satu karakteristik yang diperdebatkan adalah keanekaragaman gender pada jajaran dewan komisaris. Pentingnya keragaman gender tersebut sebagai bentuk reformasi dalam tata kelola perusahaan (Adams dan Ferreira, 2004). Hal ini semakin sering dilihat bahwa perempuan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam jajaran anggota komisaris.

Huse dan Solberg (2006) menemukan bahwa perempuan lebih berkomitmen, lebih siap, lebih rajin, dalam mengajukan berbagai pertanyaan sehingga mampu menciptakan suasana yang baik dalam rapat komisaris. Perempuan diyakini akan lebih “*aware*” terhadap masalah-masalah yang

berhubungan dengan sosial dan lingkungan. Teori agensi menjelaskan bahwa dengan adanya perempuan dalam jajaran dean komisaris dapat mengurangi atau mencegah terjadinya penyimpangan dan perusahaan dapat dikelola dengan baik pula. Demikian pula, Adams dan Ferreira (2004) menemukan bahwa lebih banyak perempuan dalam jajaran dewan komisaris akan meningkatkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efektivitas dewan dan partisipasi kehadiran perempuan cenderung lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H4 : Terdapat pengaruh positif antara proporsi komisaris perempuan terhadap pelaporan lingkungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Nama Variabel	Singkatan Nama Variabel	Deskripsi Variabel
Dependen	Proporsi Pelaporan Lingkungan	env_disc	Proporsi pelaporan lingkungan dalam laporan keuangan
Independen	Komisaris Independen	kom_ind	Jumlah komisaris independen dalam jajaran dewan
	Kepemilikan Institusional	inst_inv	Persentase investor institusional
	Ukuran Dewan Komisaris	tot_kom	Jumlah komisaris dalam jajaran dewan
	Proporsi Komisaris Perempuan	p_kom	Jumlah komisaris perempuan dalam jajaran dewan.
Kontrol	Ukuran Perusahaan	tot_asst	Total aset perusahaan
		mkt_cap	Kapitalisasi pasar
		op_rev	<i>Operating revenue</i>
Kontrol	Profitabilitas	Prop	<i>Return on Asset</i>

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau yang juga disebut dengan variabel terikat adalah variabel penelitian yang dipengaruhi oleh variabel penelitian lainnya. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Environmental Reporting* (Pelaporan Lingkungan). Pengukuran untuk variabel *Environmental Reporting* ini dapat dilihat dari pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan atau laporan keberlanjutan (*sustainability report*) secara terpisah.

Pengukuran *Corporate Social Responsibility* (CSR) menggunakan indeks GRI yang berlaku secara internasional yang telah digunakan di banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Jumlah item CSR yang diungkapkan menurut GRI adalah 79 item yang terdiri dari :

- Ekonomi : 9 item
- Lingkungan : 30 item
- Praktik tenaga kerja : 14 item
- Hak manusia : 9 item
- Masyarakat : 8 item
- Tanggung jawab produk : 9 item

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah indikator kinerja lingkungan (30 item) sesuai dengan variabel pelaporan lingkungan yang digunakan.

Pengukuran pengungkapan mengenai pelaporan lingkungan dalam penelitian ini menggunakan rumus :

$$\text{Environmental Reporting} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah item pengungkapan lingkungan GRI}}$$

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen atau yang disebut juga dengan variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah *Corporate Governance* yang diproksikan dengan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, dan Proporsi Komisaris Perempuan.

3.1.2.1 Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan bisnis ataupun hubungan lainnya dengan anggota dewan komisaris lainnya sehingga dapat bertindak lebih independen. Komisaris independen dapat lebih memantau kinerja manajemen karena posisi non-resmi mereka dalam perusahaan (Donnelly dan Mulcahy, 2008) dan memiliki insentif untuk membangun reputasi sebagai pemantau ahli yang dapat mencegah perilaku manajemen untuk melakukan tindakan kolusi dengan direksi dalam perusahaan (Carter et al, 2003). Pengukuran untuk variabel komisaris independen ini menggunakan persentase anggota komisaris independen dibandingkan dengan total anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kathyayani Kathy Rao et al, 2012 rumus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Total anggota komisaris}}$$

3.1.2.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang terkonsentrasi dan diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham besar dan / atau kelembagaan. Kepemilikan yang terkonsentrasi akan lebih mampu mempengaruhi nilai-nilai perusahaan, termasuk nilai-nilai lingkungan (Halme dan Huse, 1997). Kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proporsi jumlah saham yang dimiliki institusi dari semua saham yang beredar. Rumus yang digunakan untuk mengukur variabel yaitu :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

3.1.2.3 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh baik secara positif maupun negatif berkaitan dengan kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran dewan komisaris dilihat dari jumlah dewan komisaris yang terdapat dalam jajaran dewan komisaris yang diukur menggunakan variabel interval.

3.1.2.4 Proporsi Komisaris Perempuan

Huse dan Solberg (2006) menemukan bahwa perempuan lebih berkomitmen, lebih siap, lebih rajin, dalam mengajukan berbagai pertanyaan sehingga mampu menciptakan suasana yang baik dalam rapat komisaris. Proporsi komisaris perempuan ini diukur dengan jumlah perempuan dalam dewan komisaris dibagi dengan total anggota dewan komisaris (Kathyayani Kathy Rao *et al.* 2012). Rumus yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah :

$$\text{Komisaris Perempuan} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris perempuan}}{\text{Total anggota komisaris}}$$

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang digunakan untuk mengontrol hubungan kausalnya agar menjadi lebih baik sehingga mendapatkan model empiris yang lengkap dan lebih baik. Variabel kontrol yang digunakan berdasarkan pada penelitian Kathyayini Kathy Rao *et al.* 2012 adalah ukuran perusahaan (*firm size*), profitabilitas, dan industri. Namun, dalam penelitian tidak mengklasifikasikan ke dalam beberapa jenis industri tetapi penelitian ini hanya berfokus pada industri yang akan menjadi sampel penelitiannya yaitu perusahaan pertambangan atau industri pertambangan dan industri kimia dasar.

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan

Banyak studi telah menemukan bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) secara signifikan berhubungan dengan pengungkapan perusahaan (Lakhal, 2005 dalam Kathyayini Kathy Rao *et al.* 2012). De Villiers *et al.* (2009) menemukan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dengan adanya kinerja lingkungan yang kuat, dan terdapat juga bukti yang menunjukkan hubungan positif antara pengungkapan lingkungan dengan ukuran perusahaan (Halme dan Huse, 1997). Perusahaan yang besar akan cenderung mengungkapkan pelaporan lingkungan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian Kathyayini *et al.* (2012), terdapat tiga ukuran yang digunakan dalam pengukuran yang berkaitan dengan ukuran perusahaan, yaitu total aset, kapitalisasi pasar (*market capitalisation*), dan pendapatan operasional (*operating revenue*).

3.1.3.2 Profitabilitas

Profitabilitas juga telah ditunjukkan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan guna meningkatkan nilai dari pemegang saham. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan *Return on Asset* (ROA). Penggunaan ROA konsisten dengan studi lain yang berbasis pengungkapan (de Villiers *et al.* 2009).

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan dan perusahaan yang bergerak di industri kimia dasar yang *listing* atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2013. Perusahaan pertambangan dan industri kimia dasar menjadi fokus dalam penelitian ini dikarenakan industri tersebut adalah yang paling banyak menyebabkan kerusakan lingkungan dalam operasional perusahaannya. Hal ini didasarkan pada pernyataan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), bahwa diperkirakan sekitar 70 persen kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan. Sementara 30 persen kerusakan lingkungan lainnya disebabkan oleh industri-industri lain salah satunya sektor industri kimia dasar. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sample*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan pertambangan dan industri kimia dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2013.
2. Menyediakan laporan tahunan (*annual report*) yang lengkap selama tahun 2009-2013.
3. Menyediakan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang lengkap mengenai pengungkapan lingkungan dimana menggunakan indikator GRI.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dan telah disusun oleh pihak lain. Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan berkelanjutan (*sustainability report*) perusahaan pertambangan dan industri kimia dasar tahun 2009-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data mengenai profil dewan komisaris, data kepemilikan saham oleh investor di perusahaan, serta data mengenai pelaporan CSR khususnya pelaporan yang berkaitan dengan lingkungan oleh perusahaan. Sumber data yang digunakan dapat diperoleh dari website resmi perusahaan pertambangan dan industri kimia dasar terkait yang menjadi sampel penelitian dan dari website Bursa Efek Indonesia, selain itu data juga dapat diperoleh dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ada dua yaitu metode observasi dan metode dokumentasi. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung di lapangan. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan pertambangan dan industri kimia dasar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013.

3.5 Metode Analisis

Data dalam penelitian ini dianalisis dan diuji menggunakan alat uji statistik yang terdiri dari :

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji apakah data-data yang digunakan dalam penelitian memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dengan cara sebagai berikut :

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik histogram digunakan untuk membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal, sedangkan uji statistik menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)*.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya yaitu (Ghozali, 2011) :

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z* adalah sebagai berikut (Ghozali,2011) :

- Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011) :

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
3. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah yang

Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Cara ini dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*.

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Penelitian ini menggunakan uji *glejser* untuk lebih menjamin keakuratan hasil uji heteroskedastisitas. Uji *glejser* mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003).

3.5.3 Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2011). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Durbin – Watson (DW test). Uji Durbin –

Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel independen (Ghozali, 2011)

3.5.4 Uji Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda (*multivariate analysis*). Analisis regresi berganda dipakai untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas (metrik) terhadap satu variabel terikat (metrik) dengan menggunakan *software* SPSS. Dalam penelitian ini, model regresi berganda yang diuji adalah sebagai berikut :

$$\text{ENV_DISC} = \alpha 0 + \beta 1 \text{KOM_IND} + \beta 2 \text{INST_INV} + \beta 3 \text{TOT_KOM} + \beta 4 \text{P_KOM} + \beta 5 \text{TOT_ASST} + \beta 6 \text{MKT_CAP} + \beta 7 \text{OP_REVN} + \beta 8 \text{PROP} + e$$

Keterangan :

ENV_DISC	= <i>Environmental Reporting</i>
$\alpha 0$	= Konstanta
$\beta 1 - \beta 8$	= Koefisien
KOM_IND	= Proporsi Komisaris Independen
INST_INV	= Kepemilikan Institusional
TOT_KOM	= Ukuran Dewan Komisaris
P_KOM	= Proporsi Komisaris Perempuan
TOT_ASST	= <i>Total Asset</i>
MKT_CAP	= <i>Market Capitalisation</i>
OP_REVN	= <i>Operating Revenue</i>
PROP	= <i>Profitabilitas</i>
e	= <i>Error</i>

3.5.4.1 Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan dengan menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi (5%), maka kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

1. Bila nilai signifikansi $f < 0.05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila nilai signifikansi $f > 0.05$, maka H_0 diterima, artinya semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Koefisien Determinasi R Kuadrat (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen (Ghozali, 2011). Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien korelasi (R^2) berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Dari sini diketahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

3.5.4.3 Uji Parsial (t-test)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini digunakan juga untuk melihat apakah hipotesis dalam penelitian diterima atau ditolak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0.05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bila nilai signifikansi $t < 0.05$ maka H_0 ditolak, berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila nilai signifikansi $t > 0.05$ maka H_0 diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen dengan variabel dependen.